

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dianggap sudah optimal dalam pelaksanaannya meskipun dalam beberapa aspek belum berjalan dengan baik dan sesuai. Adapun aspek yang dianggap sudah tepat tetapi belum mampu untuk mencapai tujuan pengurangan sampah di TPA Jatibarang yaitu tepat kebijakan. Aspek target dianggap sudah tepat dilakukan untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan oleh DLH Kota Semarang di tahun 2025. Sebaliknya, aspek ketepatan pelaksanaan, lingkungan, dan proses sudah berjalan baik dan sesuai dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang.

Hal yang dianggap belum sesuai berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai tujuan dari kesesuaian isi kebijakan dengan permasalahan sampah yang hendak dicapai. Menurut Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang diharapkan masuk ke TPA Jatibarang di pemrosesan akhir yaitu sisa hasil residu yang sudah melalui proses pemilahan sehingga membutuhkan peran dan kesadaran masyarakat Kota Semarang untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini. Di samping itu, kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang juga digerakkan untuk mencapai target yang

sebelumnya sudah ditetapkan oleh DLH Kota Semarang bahwa pada tahun 2025 diharapkan dapat mencapai target pengurangan 30% dan penanganan 70%. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat Kota Semarang dinilai belum memiliki kesadaran untuk berpartisipasi mengurangi sampah di hulu untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang

Faktor yang dianggap sebagai faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang yaitu komunikasi serta standar dan sasaran kebijakan. Komunikasi yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang dalam memberikan arahan ke TPA Jatibarang dinilai sudah baik dengan arahan yang jelas. Dalam hal ini DLH Kota Semarang memberikan arahan ke TPA Jatibarang sebagai pelaksana pengelolaan sampah di tahap pemrosesan akhir sampah. Standar dan sasaran kebijakan juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang karena memuat standar pelaksanaan kebijakan yang jelas yang dilakukan untuk menghindari kegagalan juga mendukung untuk mencapai target kebijakan. Selain itu, sasaran kebijakan dicapai melalui upaya atau proses yang telah dilakukan melalui bimbingan teknis dan optimalisasi Bank Sampah & TPS 3R.

Kemudian, faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang yaitu sumber daya serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Sumber daya menjadi faktor

penghambat kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, dengan jumlah SDM 36 orang yang terkadang harus rangkap tugas dianggap belum memadai dalam implementasi kebijakan. Jumlah yang terbatas ini mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Sumber dana yang sudah dianggarkan khusus untuk pemrosesan akhir di TPA Jatibarang nyatanya belum memadai. Begitu juga dengan sarana dan prasarana alat berat belum mencapai jumlah ideal yang seharusnya berjumlah 9 tetapi TPA Jatibarang hanya memiliki lima dengan kondisi kelayakan berupa rusak ringan dan rusak sedang. Hal ini yang kemudian menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang mana fungsinya sebagai alat perataan sampah. Proyek PLTSa, sebagai penyelesaian lingkungan atas gas metana di TPA Jatibarang, menjadi faktor penghambat karena belum mampu berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini menjadi permasalahan karena tidak ada penyelesaian lingkungan atas gas metana yang ada di TPA Jatibarang.

Lingkungan sosial berhubungan dengan perilaku klasik masyarakat Kota Semarang yang belum mendukung implementasi pengurangan sampah di TPA Jatibarang. Masyarakat masih cenderung enggan mengelola sampah mereka sendiri dan lebih memilih untuk membayar uang pengelolaan sampah padahal pengurangan sampah membutuhkan peran nyata dari masyarakat bukan hanya melalui uang pengelolaan sampah. Lingkungan ekonomi berkaitan dengan produksi sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Semarang yang setiap tahunnya mengalami kenaikan nyatanya menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Keberadaan sapi-sapi di TPA Jatibarang

yang seharusnya membantu mengurangi sampah organik kenyataannya menjadi penghambat Kota Semarang untuk mendapatkan penghargaan adipura kembali. Sapi, menjadi indikator penghargaan adipura bagi kabupaten/kota di Indonesia sehingga dibutuhkan upaya relokasi dari Pemkot Semarang untuk menangani larangan tersebut sekaligus sebagai dukungan Pemkot Semarang dari lingkungan politik.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dapat diberikan saran sebagai berikut:

4.2.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang

1. Ketepatan Kebijakan

Sosialisasi secara masif dan menyeluruh kepada masyarakat umum, pemerintah desa/kelurahan, dan pemilik usaha mengenai kebijakan pengelolaan sampah agar seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dan sadar untuk memilah sampah sehingga mampu mencapai tujuan pengurangan sampah.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Peningkatan kerjasama lima pilar (pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan akademisi) sebagai dasar utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, akan memberikan kontribusi pada target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan DLH Kota Semarang di tahun 2025 yaitu 30% dan 70%.

3. Ketepatan Target

Perencanaan matang untuk menambah kuantitas dan optimalisasi pada Bank Sampah dan TPS 3R guna menunjang proses pengumpulan dan pemilahan sampah untuk membantu mengurangi produksi sampah di hulu sebelum diangkut ke hilir.

4. Ketepatan Lingkungan

Peningkatan skala besar pada pemanfaatan maggot dalam upaya pengurangan sampah organik dan melakukan upaya berkelanjutan yang jelas terhadap pengembangbiakan maggot.

5. Ketepatan Proses

Perencanaan matang dalam upaya kerjasama pada proyek insinerator yang masih dalam proses untuk menghindari kegagalan proyek yang berdampak pada kerugian material dan operasional.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang

1. Komunikasi

Pengenalan psikologi dan cara berkomunikasi untuk mengetahui karakter individu sehingga dapat diketahui upaya penyelesaian masalah yang kemungkinan akan terjadi. Komunikasi menjadi faktor penting untuk mengenali lingkungan kerja yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dalam menjalankan kebijakan yang diamanatkan oleh DLH Kota Semarang juga mencapai target pengurangan dan penanganan yang telah ditetapkan.

2. Sumber Daya

Peningkatan kompetensi staff dalam pelaksanaan tugas untuk mengatasi rangkap tugas sehingga dapat lebih optimal dalam pelaksanaan tugas melalui bimbingan teknis pengelolaan sampah yang biasanya dilakukan oleh DLH Kota Semarang juga memaksimalkan alat berat sebagai sarana utama perataan sampah yang diharapkan dapat mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan DLH Kota Semarang di tahun 2025.

3. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kerjasama dengan pihak swasta yang berperan dalam mengolah sampah dengan mengedepankan tiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mencapai hasil yang maksimal. Kerjasama yang dilakukan harus dilatarbelakangi dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang untuk menghindari kegagalan kerjasama sebelum masa kontrak selesai juga mencapai target kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Penambahan jenis tempat sampah beserta papan informasi yang menerangkan fungsi dari tempat sampah dengan penanda warna berbeda. Hal ini mendorong proses daur ulang sampah lebih mudah dilakukan karena sampah sudah dipilah di hulu nya. Pemilahan sampah dapat menghasilkan sirkuler ekonomi yang dibantu oleh pemerintah (politik) melalui pengadaan tempat sampah sehingga membantu dalam mencapai target kebijakan yang telah ditetapkan.